Analisis Operasi Kogabwilhan I dalam Menghadapi Ancaman Non-Konvensional Guna Mendukung Keamanan Nasional

Syahril Hidayat*[1], Gunawan Triutomo[2], Muh. Ilham[3]
[1,2,3]Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia
E-mail: syahrilhidayat754@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2025-10-07
Revised: 2025-11-13
Published: 2025-12-01

Keywords:
Kogabwilhan I;
Non-Conventional Threats;
National Security;
Hybrid Operations;
Cross-Sectoral Synergy;
Grey Zone.

Abstract
The increasing complexity of non-conventional threats such as terrorism, cybercrime, and disinformation poses a significant challenge to Indonesia's national security. Kogabwilhan I as the main operational command in the strategic western region, plays a crucial role in integrating the three dimensions forces of the TNI. This study aims to analyze the implementation, effectiveness, and inhibiting factors of Kogabwilhan I's operations in addressing these multidimensional threats, and to formulate recommendations for improvement. This qualitative research employs a case study design. Data was collected through semi-structured interviews with key informants and supported by documentation studies. Data was thematically analyzed using NVivo, with validity strengthened through source triangulation. The results indicate that Kogabwilhan I has transformed its operations toward an adaptive Integrated Hybrid Joint Operations model, incorporating soft power-based Military Operations Other Than War (MOOTW) and territorial development as the first layer of defense. Operational effectiveness heavily relies on the level of cross-sectoral synergy with the Polri, BIN, and BNPT. However, major constraints were identified: the speed of technological adaptation by threats outpacing the cycle of defense equipment renewal, the difficulty in identifying threats within the grey zone, and a lack of digital native human resources proficient in data analysis. Based on these findings, the study recommends establishing an Integrated Data Fusion Center and prioritizing the budget for maritime cyber capability. Theoretically, it proposes the development of an Integrated Grey Zone Analysis Model and the formulation of a new Hybrid Deterrence doctrine.

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2025-10-07
Direvisi: 2025-11-13
Dipublikasi: 2025-12-01

Kata kunci:
Kogabwilhan I;
Ancaman Non Konvensional;
Operasi Hibrida;
Sinergi Lintas Sektor;
Grey Zone.

Abstrak
Meningkatnya kompleksitas ancaman non-konvensional seperti terorisme, kejahatan siber, dan disinformasi memberikan tantangan signifikan bagi keamanan nasional Indonesia. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I), sebagai komando operasional utama di wilayah barat yang strategis, berperan krusial dalam mengintegrasikan kekuatan Tri Matra TNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, efektivitas, serta faktor penghambat operasi Kogabwilhan I dalam menghadapi ancaman multidimensional tersebut, sekaligus merumuskan rekomendasi peningkatannya. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci dan didukung studi dokumentasi. Data dianalisis tematik menggunakan NVivo, dengan validitas diperkuat melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan Kogabwilhan I telah mentransformasikan operasinya menuju model Operasi Gabungan Hibrida Terpadu yang adaptif, mengintegrasikan OMSP berbasis soft power dan pembinaan teritorial sebagai lapis pertahanan pertama. Efektivitas operasi sangat bergantung pada tingkat sinergi lintas sektor dengan Polri, BIN, dan BNPT. Namun, ditemukan hambatan utama, yaitu kecepatan adaptasi teknologi ancaman yang melampaui siklus pembaruan alutsista, kesulitan mengidentifikasi ancaman di wilayah abu-abu (grey zone), serta kurangnya SDM digital native yang fasih dalam analisis data. Berdasarkan temuan, direkomendasikan pembentukan Pusat Analisis Data Terintegrasi (Integrated Data Fusion Center) dan prioritas anggaran untuk kapabilitas siber maritim. Secara teoritis, diusulkan pengembangan Model Analisis Grey Zone Terpadu dan perumusan doktrin Hybrid Deterrence baru.

I. PENDAHULUAN

Keamanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis yang melibatkan integritas wilayah, kedaulatan negara, serta perlindungan segenap bangsa dari segala ancaman, baik internal maupun eksternal. Dalam konteks ini, Tentara Nasional Indonesia memiliki peran sentral sebagai komponen utama pertahanan negara.

Peran ini diwujudkan melalui Kotamaops (Komando Utama Operasional) TNI, di mana Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan) menjadi salah satu pilar utamanya. Kogabwilhan mengintegrasikan kekuatan TNI dari ketiga matra (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU) di wilayah-wilayah strategis untuk menanggulangi ancaman militer dan non-militer secara komprehensif.

Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I) memegang peranan krusial sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya baik untuk OMP maupun OMSP dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat ke-kacauan keamanan di wilayahnya dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Ancaman ini mencakup gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, pengamanan wilayah perbatasan, kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia dan narkoba, serta bencana alam dan pandemi. Ancaman-ancaman ini memanfaatkan kerenta-nan sosial, ekonomi, dan politik, mengancam kedaulatan, tatanan sosial, serta stabilitas ekonomi negara. Oleh karena itu, kemampuan Kogabwilhan I untuk beradaptasi dengan spektrum ancaman yang lebih luas ini sangat menentukan dalam mendukung stabilitas dan keamanan nasional secara menyeluruh.

Dinamika lingkungan strategis global dan regional menunjukkan pergeseran fokus ancaman yang signifikan, di mana ancaman non-konvensional cenderung memanfaatkan kerentanan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Misalnya, terorisme modern beroperasi dalam jaringan tersembunyi yang canggih, memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan ideologi radikal dan merekrut anggota baru. Sementara itu, kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan manusia, narkoba, dan senjata ilegal, dijalankan oleh sindikat terorganisir dengan sumber daya dan jaringan internasional yang kuat.

Berikut adalah data pelanggaran-pelanggaran keamanan laut yang terjadi di wilayah kerja Kogabwilhan I, sebagai berikut:

Tabel 1. Pelanggaran Keamanan Laut di Wilayah Kerja Kogabwilhan

No	Katagori	Jumlah Pelanggaran
1	Perompakan	13
2	IUU Fishing	23
3	Pembalakan Liar	5
4	TKI Ilegal	20
5	Survei Hidros Ilegal	2
6	Pelanggaran Peraturan Pelayaran	128
7	Perusakan Ekosistem	1
8	Pelanggaran Wilayah/Batas	4
9	Penambangan_Ilegal	1
10	Penyelundupan	48
11	Gejolak Sosial Maritim	3
	Total	248

(Sumber: Kogabwilhan I)

Berdasarkan dari tabel 1, pelanggaran-pelanggaran ini merupakan ancaman non-konvensional dimana tidak hanya mengganggu kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial dan melemahkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dari seluruh elemen pertahanan dan keamanan, termasuk Kogabwilhan I, untuk menghadapi tantangan ini.

Menanggapi tantangan yang kompleks ini, Kogabwilhan I memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan operasi militer dan non-militer di wilayahnya, yang mencakup sebagian besar wilayah barat Indonesia. Wilayah yang sangat strategis ini, termasuk Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan perbatasan darat dengan Malaysia, sangat rentan terhadap berbagai ancaman non-konvensional. Dalam menghadapi ancaman ini, Kogabwilhan I tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga menjalin kolaborasi erat dengan lembaga lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sinergi ini memungkinkan Kogabwilhan I untuk melaksanakan operasi yang bersifat multidomain dan multiagency, yang sangat efektif dalam menanggulangi ancaman yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja.

Analisis terhadap operasi Kogabwilhan I menjadi sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap kemampuan intelijen, kecepatan

respons, koordinasi antar lembaga, dan pemanfaatan teknologi terkini. Melalui analisis mendalam, celah-celah strategis dapat diidentifikasi, seperti kurangnya pengawasan maritim yang dimanfaatkan oleh penyelundup atau kekurangan dalam pelatihan personel untuk menghadapi serangan siber atau operasi psychological warfare. Hasil dari analisis ini menjadi landasan kuat untuk merumuskan kebijakan dan doktrin operasi yang lebih relevan, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ancaman non-konvensional.

Berdasarkan urgensi di atas, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap operasi Kogabwilhan I dalam menghadapi ancaman non-konvensional guna mendukung keamanan nasional. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana Kogabwilhan I mengintegrasikan berbagai sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya untuk merespons ancaman secara efektif. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pimpinan TNI dan pemerintah guna peningkatan kapabilitas, penguatan sinergi antar lembaga, serta perumusan kebijakan yang lebih responsif di masa depan. Pada akhirnya, semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa Kogabwilhan I dapat terus berperan optimal sebagai penjaga kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti memilih penelitian dengan judul " Analisis Operasi Kogabwilhan I Dalam Menghadapi Ancaman Non-Konvensional Guna Mendukung Keamanan Nasional."

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan penelusuran dokumen. Penelitian ini berusaha mengungkapkan secara mendalam terhadap peristiwa dan kejadian yang ditemukan pada latar penelitian secara alami. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa kata-kata, gambar, atau simbol-simbol yang dapat diinterpretasikan, dan tidak diukur dengan angka-angka atau satuan ukuran tertentu.

Penulis menggunakan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah desain studi yang digunakan dalam berbagai domain, termasuk penilaian dimana peneliti mengkonstruksi dan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap suatu kasus, yang umumnya berupa program, peristiwa, aktivitas, proses satu orang atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi yang komprehensif menggunakan berbagai pendekatan pengumpulan data berdasarkan pada waktu yang disediakan. Menurut definisi penulis, studi kasus adalah mempelajari sesuatu point of interest sesuatu topik yang spesifik dan unik yang menjadi fokus perhatian penulis.

Penelitian ini dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus pada fenomena TNI dalam operasi menghadapi ancaman non-konvensional. Maka dari itu, penulis bermaksud memberikan analisis intelijen dan upaya strategis Kogabwilhan I dalam mengatasi ancaman non-konvensional melalui jawaban pertanyaan wawancara maupun melalui mempelajari dokumen RO (rencana operasi) dan Laplak (laporan pelaksanaan tugas) dari Kogabwilhan I.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kogabwilhan I telah berhasil mentransformasikan operasinya menuju model Operasi Gabungan Hibrida Terpadu yang adaptif, mengintegrasikan berbagai elemen kekuatan TNI dari ketiga matra serta menjalin kolaborasi erat dengan lembaga-lembaga non-militer seperti Polri, BIN, dan BNPT. Meskipun demikian, efektivitas operasionalnya sangat bergantung pada tingkat sinergi lintas sektor yang masih memiliki tantangan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang kurang siap menghadapi ancaman siber dan psikologis. Selain itu, kecepatan adaptasi terhadap teknologi ancaman yang semakin canggih juga menjadi hambatan signifikan dalam upaya menghadapi ancaman di wilayah abu-abu (grey zone). Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah kurangnya SDM yang memiliki keahlian di bidang analisis data dan teknologi informasi, yang mempengaruhi kemampuan Kogabwilhan I dalam merespons ancaman secara cepat dan akurat. Untuk mengatasi kendala ini, penelitian merekomendasikan pembentukan Pusat Analisis Data Terintegrasi dan prioritas anggaran untuk kapabilitas siber maritim guna meningkatkan sinergi dan efektivitas dalam menghadapi ancaman non-konvensional di masa depan.

B. Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Kogabwilhan I telah berhasil mengadaptasi model Operasi Gabungan Hibrida Terpadu dalam menghadapi ancaman non-konvensional, tantangan yang dihadapi cukup kompleks. Kogabwilhan I telah melakukan integrasi yang efektif antara kekuatan militer dan lembaga non-militer, seperti Polri, BIN, dan BNPT, yang merupakan langkah positif dalam menghadapi ancaman yang tidak hanya berbentuk serangan militer, tetapi juga ancaman berupa kejahatan transnasional, terorisme, dan serangan siber. Namun, keberhasilan integrasi ini sangat bergantung pada kualitas dan keterampilan SDM yang terlibat dalam operasi. Salah satu hambatan terbesar yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan untuk menghadapi ancaman siber dan psikologis secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM yang terampil dalam analisis data dan pengelolaan teknologi informasi, yang berperan penting dalam mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat. Dalam hal ini, teknologi menjadi faktor penentu, namun Kogabwilhan I belum mampu mengejar perkembangan teknologi ancaman yang semakin pesat, yang menyebabkan celah dalam efektivitas respons.

Selain itu, tantangan lainnya adalah pengidentifikasian ancaman yang sering terjadi di wilayah abu-abu (grey zone), yang semakin sulit ditangani dengan menggunakan metode tradisional. Ancaman-ancaman tersebut sering kali tidak dapat dikenali dengan jelas, sehingga membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif dan fleksibel dalam operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Pusat Analisis Data Terintegrasi yang akan memperkuat kemampuan intelijen dan respons terhadap ancaman yang tidak terduga, sekaligus memberikan prioritas terhadap pengembangan kapabilitas siber maritim untuk menghadapi ancaman digital yang semakin berkembang. Selain itu, peningkatan pelatihan dan pembekalan SDM yang terampil dalam teknologi informasi, serta memperkuat koordinasi antara lembaga, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa operasi Kogabwilhan I dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien dalam menjaga keamanan nasional.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan operasi Kogabwilhan I telah bergeser dari pendekatan murni militer konvensional menjadi Operasi Gabungan Hibrida Terpadu yang bersifat adaptif. Transformasi ini diwujudkan melalui pengintegrasian OMSP Soft Power (pembinaan teritorial) sebagai lapis pertahanan ideologi dan sosial, sementara kekuatan matra (darat, laut, udara).
2. Efektivitas operasional Kogabwilhan I dalam merespons ancaman non-konvensional sangat bergantung pada tingkat Triangulasi Sinergi Lintas Sektor dengan institusi non-militer (seperti BIN, BNPT, dan Polri).
3. Hambatan utama Kogabwilhan I bukan terletak pada doktrin, melainkan pada kecepatan adaptasi. Ancaman non-konvensional modern memiliki kecepatan adaptasi teknologi yang jauh melampaui siklus pembaruan alutsista dan infra-struktur teknologi. Selain itu, kurangnya SDM digital native yang fasih dalam data analytics dan keamanan siber menjadi kendala signifikan dalam memaksimalkan potensi Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) modern.
4. Ancaman non-konvensional akan semakin terintegrasi dengan ancaman siber maritim. Oleh karena itu, kemampuan untuk melindungi infrastruktur kritis kelautan dari serangan siber menjadi prasyarat bagi tercapainya keamanan nasional di wilayah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Kogabwilhan I adalah mengidentifikasi ancaman di dalam wilayah abu-abu (grey zone), di mana isu sosial, ekonomi, dan politik yang sah seringkali dieksploitasi oleh aktor non-negara untuk tujuan subversif. Untuk mengatasi ambiguitas ini, direkomendasikan pengembangan sebuah Model Analisis Grey Zone Terpadu. Model ini secara teoritis harus memperluas kerangka penilaian ancaman konvensional dengan memasukkan variabel-variabel non-militer sebagai indikator utama.

Secara spesifik, model ini akan mengintegrasikan indikator sosial, ekonomi, dan siber ke dalam matriks penentuan tingkat ancaman, setara dengan indikator militer. Dengan demikian, landasan teori Triangulasi

Data/Sumber Pertahanan akan diperkuat, bergerak melampaui sekadar triangulasi antar-lembaga menjadi triangulasi antar-domain ancaman. Implementasi model ini akan memberikan Kogabwilhan I sebuah alat analitis yang lebih tajam untuk mendefinisikan batas antara konflik sipil biasa dengan potensi ancaman non-konvensional yang disamarkan, sehingga memungkinkan respons yang lebih proporsional dan tepat waktu.

Selanjutnya, setelah ancaman dapat diidentifikasi dengan lebih baik, respons doktrinal juga memerlukan evolusi. Untuk itu, perlu adanya kajian mendalam untuk meng-integrasikan secara formal konsep Kekuatan Pencegahan (Deterrence) konvensional dengan Kekuatan Lunak (Soft Power) yang dilaksanakan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Saat ini, praktik tersebut telah berjalan secara adaptif, di mana kekuatan konvensional ditempatkan sebagai faktor penangkal sementara operasi teritorial dijalankan untuk memenangkan dukungan masyarakat. Namun, formalisasi konsep ini ke dalam sebuah doktrin yang utuh akan memberikan landasan yang lebih kokoh.

Rekomendasi ini bertujuan untuk meng-hasilkan sebuah doktrin Hybrid Deterrence baru yang revolusioner. Dalam doktrin ini, keamanan ideologi dan ketahanan sosial masyarakat diakui memiliki tingkat kepenti-ngan yang setara dengan kekuatan tempur fisik. Dengan demikian, doktrin pertahanan tidak lagi hanya berpusat pada alutsista, tetapi secara eksplisit menjadikan masyarakat sebagai pusat gravitasi pertahanan (center of gravity). Pendekatan ini akan menciptakan postur pertahanan yang holistik, di mana pencegahan ancaman non-konvensional tidak hanya berasal dari kekuatan militer, tetapi juga dari ketahanan dan kepercayaan rakyat itu sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

Adler, Emanuel, and Michael Barnett. "Security Communities." Security Studies 7, no. 1 (1998): 1-38.

Bambang Darmono," Keamanan Nasional Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia,"Wantannas.go.id, diakses pada 23 Agustus 2025, https://www.wantannas.go.id/storage/buku/kamnas-wantannas.pdf

Choirul Saleh," Konsep, Pengertian dan tujuan Kolaborasi," pustaka.ut.ac.id, diakses pada 23 Agustus 2025, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/DAPU6107-M1.pdf

Clausewitz, Carl von. (1832). On War.

Darwanto," Operasi Militer Selain Perang," Kemhan.go.id, diakses pada 3 Agustus 2025, https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/bab47c96d3592e7652310529454b1107.pdf

Hartind Asrin," Sistem Informasi Pertahanan Negara Yang Terintegrasi Dalam Menghadapi Perang Informasi," kemhan.go.id, diakses pada tanggal 23 Agustus 2025, https://www.kemhan.go.id/2012/05/21/sistem-informasi-pertahanan-negara-yang-terintegrasi-dalam-menghadapi-perang-informasi.html

Ip Defense Forum," Countering Nontraditional Security Threats," Ipdefenseforum.com, diakses pada 23 Agustus 2025, https://ipdefenseforum.com/2022/12/countering-nontraditional-security-threats/

Jurnalmaritm," Pengendalian Laut Di Selat-Selat Strategis Guna Mendukung Sistem Pertahanan Semesta," Jurnalmaritm.tnial.mil.id, diakses pada 23 Agustus 2025, https://jurnalmaritim.tnial.mil.id/index.php/IMJ/article/download/40/28

Kant, Immanuel. (1795). Perpetual Peace: A Philosophical Essay.

Kuncoro, M. (2018). Doktrin Pertahanan Semesta: Konsep dan Implementasi. Jurnal Pertahanan & Keamanan.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Morgenthau, Hans J. (1948). Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace.

Paris, Roland. "Human Security: Paradigm Shift or Hot Air?" International Security 26, no. 2 (2001): 87-102.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tugas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pasal 4

S. Hadi. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi [Examination of the Validity of Qualitative Research Data on Thesis].(S1 Ilmu Pendidikan 2016), 21–22.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Jakarta, Erlangga, 2013.

Sujarweni, V. Wiratna. Metode Penelitian. Yogyakarta, PT. Pustaka Baru, 2014.

Ullman, Richard H. "Redefining Security." International Security 8, no. 1 (1983): 129-153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, Pasal 1 Ayat 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1.

Waltz, Kenneth N. 1979. Theory of International Politics. Boston: McGraw-Hill.

Wendt, Alexander. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge University Press.